

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti uraikan pada bab sebelumnya mengenai Peran Badan Perencanaan Pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Studi kasus Kota Banjarbaru sebagai ibukota provinsi Kalimantan Selatan) maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran BAPPEDA Provinsi Kalimantan Selatan dalam rencana tata ruang wilayah pelaksanaannya tersebut masih belum efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak kekurangan dan kendala yang dihadapi oleh BAPPEDA Provinsi Kalimantan Selatan dalam menjalankan perannya dikarenakan masih terjadi adanya beberapa ketimpangan contohnya dalam hal Penegak hukum yang masih kurang dan juga banyaknya masyarakat yang tidak menyetujui perpindahan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan dikarenakan faktor kebudayaan Kota Banjarbaru yang bersifat Heterogen atau campuran ini sehingga Peran BAPPEDA Provinsi Kalimantan Selatan ini masih belum bisa dikatakan efektif. Bukankah sudah tertera didalam UU RI No 26 tahun 2007 bahwa negara menyelenggarakan penataan ruang sebesar besar besarnya untuk kemakmuran rakyat.
2. Kendala yang dihadapi dari pihak BAPPEDA Provinsi Kalimantan Selatan maupun Balai Kota Banjarbaru yaitu sama-sama di faktor sarana dan fasilitas yaitu Anggaran. Anggaran yang turun dari pusat juga tidak bisa

digunakan seluruhnya untuk permasalahan pembangunan Anggaran tersebut pastinya tidak mencukupi dan lagi-lagi harus mengambil dari Pajak daerah dan lainnya.

## **B. Saran**

1. Untuk Pihak BAPPEDA Provinsi Kalimantan selatan agar lebih memperkuat kordinasi dengan BAPPEDA Kota Banjarbaru, dinas PUPR, dan Pemerintah kota Banjarbaru
2. Untuk bidang pembangunan Balai Kota Banjarbaru agar lebih memperhatikan RTRW Provinsi maupun kota supaya tidak gugup pas ditanya oleh mahasiswa mengenai pembangunan daerah.